



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 54/PUU/PAN.MK/AP3/04/2022**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **sembilan belas** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh dua** pukul **19:24** WIB, diajukan **Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

H. Ibnu Sina, S.Pi., M.Si.,(Wali Kota Banjarmasin) dan H. Harry Wijaya, S.H., M.H., (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin) , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Maret 2022 memberi kuasa kepada Dr. H. LUKMAN FADLUN, S.H., M.H., dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Rabu** tanggal **dua puluh** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh dua** pukul **16:05** WIB.

**Panitera
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
AP3 Nomor 54/PUU/PAN.MK/AP3/04/2022

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Pemohon : H. Ibnu Sina, S.Pi., M.Si., (Wali Kota Banjarmasin) dan H. Harry Wijaya, S.H., M.H.,
(Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin)

Pokok Permohonan : Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Provinsi Kalimantan Selatan

No APPP : 54/PUU/PAN.MK/AP3/04/2022

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Surat Kuasa	1	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	1	
5	Alat Bukti	1	
6	UU Nomor 25 Tahun 1956 (alat bukti P.2)	1	
7	UU Nomor 12 Tahun 2011 (alat bukti P.3)	1	
8	UU Nomor 15 Tahun 2019 (alat bukti P.4)	1	
9	UU Nomor 9 Tahun 2022 (alat bukti P.5)	1	
10	UU Nomor 10 Tahun 2022 (alat bukti P.6)	1	
11	Keputusan Pengangkatan Wali Kota (alat bukti P.7)	1	
12	Keputusan Pengangkatan Ketua DPRD (alat bukti P.8)	1	
13	Persetujuan Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota Banjarmasin dengan DPRD Kota Banjarmasin (alat bukti P.9)	1	
14	Daftar Hadir Rapat Paripurna (alat bukti P.10)	1	
15	Perda Nomor 8 Tahun 2021 (alat bukti P.11)	1	
16	Berita Acara Musrenbang RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan (alat bukti P.12)	1	
17	Keputusan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (alat bukti P.13)	1	
18	Perda Nomor 7 Tahun 2016 (alat bukti P.14)	1	
19	Perda Nomor 3 Tahun 2019 (alat bukti P.15)	1	
20	Pernyataan Keberatan Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan (alat bukti P.16)	1	
21	Pernyataan Keberatan Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan (alat bukti P.17)	1	
22	Notulen Acara Badadapatan Manyambung Silaturahmi (alat bukti P.18)	1	
23	Daftar Hadir Acara Badadapatan Manyambung Silaturahmi (alat bukti P.19)	1	

24	Penyusunan Rancangan Undang-Undang yang Berasal dari Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi (alat bukti P.20)	1	
25	Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan - Kerugian Kota Banjarmasin (alat bukti P.21)	1	
26	Parlementaria DPR (alat bukti P.22)	1	
27	Rancangan (8 Pasal) UU tentang Provinsi Kalimantan Selatan (alat bukti P.23)	1	
28	Rancangan (50 Pasal) UU tentang Provinsi Kalimantan Selatan (alat bukti P.24)	1	
29	Rancangan (58 Pasal) UU tentang Provinsi Kalimantan Selatan (alat bukti P.25)	1	

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.